

**BPLS (BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO)
DALAM MENANGANI BENCANA LUMPUR SIDOARJO**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA ISLAM

OLEH:

DHITA RESTY HANDAYANI

11370027

PEMBIMBING

DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

NIP 196301311992031004

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Porong merupakan suatu kecamatan yang berada di wilayah Sidoarjo Jawa Timur yang saat ini tengah diperbincangkan masyarakat dikarenakan bencana yang semburan lumpur yang sedang melanda daerah tersebut. Semburan lumpur ini muncul dari tahun 2006 hingga sekarang sembran lumpur tersebut masih aktif menyembur. Ada dua hipotesa yang diindikasikan memicu semburan ini. Pertama akibat kesalahan teknis dalam menjalankan tugasnya dan yang kedua hal ini dipicu oleh gempa di Yogyakarta beberapa saat lalu. Pemerintah kemudian membentuk TimNas PSLs untuk membantu menyelidiki dan mengatasi penyebab semburan yang kemudian digantikan oleh BPLS yang memiliki tugas lebih kompleks dari pada TimNas PSLs.

BPLS yang terdiri dari beberapa menteri dan pejabat yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat semburan lumpur ini seakan pekerjaannya hanya berada dibalik layar. Padahal tugas BPLS sangat penting dalam menjadi penengah baik antara pihak pemerintah, PT. Lapindo Brantas, dan masyarakat khususnya. Sehingga dalam penelitian ini akan memfokuskan peran BPLS sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan semburan lumpur di wilayah Porong Sidoarjo dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dimana penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang data-datanya akan didapatkan secara langsung dengan metode mewawancarai secara langsung dengan pihak BPLS dan beberapa masyarakat dari korban bencana lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan keterangan mengenai permasalahan bencana semburan lumpur di Sidoarjo tersebut. Data sekunder juga akan didapat dengan mengumpulkan jurnal, website, maupun surat kabar yang berhubungan dengan BPLS.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, peran BPLS dalam menangani bencana lumpur Sidoarjo mereka telah melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah dan memberikan ganti kepada para korban. BPLS telah menjalankannya melalui beberapa programnya yang berkaitan dengan penanganan bencana lumpur Sidoarjo, seperti pelatihan-pelatihan, pemberian air bersih dan pengobatan serta pemulihan infrastruktur yang dilakukan oleh BPLS. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun BPLS telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam *siyasah syar'iyah*.

Kata kunci : BPLS, Lumpur Lapindo, Lumpur Sidoarjo.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dhita Resty Handayani
NIM : 11370027
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Eksistensi BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)
Sebagai Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menangani
Bencana Lumpur Sidoarjo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 November 2016



Dhita Resty Handayani
NIM 11370027



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Dhita Resty Handayani
NIM : 11370027
Judul Skripsi : Eksistensi BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Sebagai Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menangani Bencana Lumpur Sidoarjo

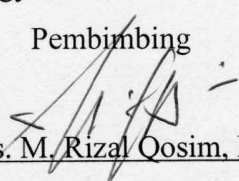
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Yogyakarta, 17 November 2016

Pembimbing


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP 196301311992031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-579/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)

Dalam Menangani Bencana Lumpur Sidoarjo

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dhita Resty Hadayani
Nomor Induk Mahasiswa : 11370027
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:


Ketua Sidang



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP 19630131 199203 1 004

Penguji I

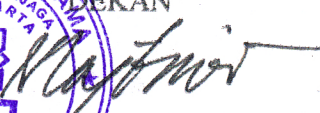
Penguji II


Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 1970081699703 1 002


Siti Jahroli, S.H.I., MSI.
NIP.19790418 200912 2 001

Yogyakarta,
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.. '..	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ —	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ — اَ —	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhirnya katanya ta marbutah yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl / raudatul atfāl.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال. Namun dalam sistem transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ – ar-rajulu

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan atau sesuai dengan bunyinya.

Contoh: القَلَمُ – al-qalamu

Baik diikuti oleh syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung/ hubung.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkannya maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam

EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: **إِلَّا رَسُوْلُوْ مَا مُحَمَّدٌ**

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memnag lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

HIDUP ADALAH BELAJAR

(anonymous)

Ketulusan akan melahirkan keikhlasan. Dan

keikhlasan adalah pangkal kebahagiaan

(anonymous)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

orang tua

Papa (Hendra Nuryadi)

Mama (Jhuslini Chris Handayani)

*yang selalu mendukung dan senantiasa
menyertakan nama penulis dalam setiap
doanya.*

Dan Untuk Adek (Angga Fredy Nuryadi)

*Yang selalu memberi semangat dan motivasi
kepada penulis*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Penulis merasa bahwa skripsi dengan judul “BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Dalam Menangani Bencana Lumpur Sidoarjo” bukan merupakan karya penulis semata, bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak. Walaupun tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan, penulis mohon maaf dan terimakasih kepada :

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, Ph d selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara dan Politik Islam) Fakultas Syari’ah dan Hukum;
4. Prof. Dr. H. Akh Minhaji, MA. Ph.D. Dosen Penasehat Akademik selama menempuh program strata satu (S1); di jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini;
6. Seluruh dosen/pengajar yang telah membagikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Bapak, ibu dan staff UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kemudahan administrasi dari awal hingga selesai skripsi ini
8. Keluarga KKN Cekel. Mbak Oyip, Pina, Dek Hilda, Teh Milda, Kak Nop, Kakak Kid, Abi Sultan. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan dari awal kita singgah di desa orang hingga saat ini;
9. Seluruh keluarga besar Jurusan Siyasah angkatan 2011. Mbak Eka, Jesinta, Mbak Hani, Rista, Abbas, Riyan, Fauzan, Ghufron dan teman-teman lain yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih atas saran-sarannya yang diberikan kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam pengerjaan skripsi;
10. Teman-teman di kos Wisma Asri. Mbak Ari, Mbak Yuli, Naning, Anis, dek Rahma, Mbak Estri, Mbak Vivi, Lala, Tika dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan yang tak pernah ada habisnya;
11. Keluarga di Porong. Unnie, Mbak Titin, Mbak Dwi, Ria, keluarga besar Mbak Retno, keluarga besar kak Yunifan dan keluarga besar Mbak Fika. Terimakasih atas bantuannya dalam penelitian skripsi ini.

12. Keluarga besar BPLS khususnya Bapak Slamet Priambodo, M.Sc, Bapak Sutopo Wahyu Utomo, SH, MM. Terimakasih telah membantu dalam memberikan informasi terkait isi dari skripsi.

13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkannya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 5 September 2016

Penulis,

Dhita Resty Handayani

NIM 11370027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB.....	viii
HALAMAN MOTTO	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TEORI DAN TUGAS POKOK PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT	
A. Tugas pokok pemerintah terhadap masyarakat	14
B. Teori <i>fiqh siyasah</i>	21
1. Definisi <i>fiqh siyasah (siyasah syar'iyyyah)</i>	21

2. Kedudukan pemerintah dalam <i>fiqh siyasah</i>	29
BAB III BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) DALAM MENANGANGILUMPUR SIDOARJO	
A. Pembentukan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)	35
B. Kondisi di sekitar Semburan Lumpur	
1. Masyarakat Porong.....	47
2. PT. Lapindo Brantas.....	48
3. Penyebab terjadinya lumpur dan dampaknya	49
C. Program-Program BPLS	
1. Menangani ganti rugi	61
2. Pelatihan-Pelatihan Yang Diadakan BPLS	64
3. Memulihkan Infrastruktur	68
4. Pemberian air bersih dan pengobatan	72
BAB IV ANALISIS TUGAS BPLS PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH	
A. Pemerintah Dalam membentuk BPLS	76
B. BPLS dalam menangani ganti rugi	79
C. Pelatihan-pelatihan, pemberian air bersih dan pengobatan serta pemulihan infrastruktur yang diadakan BPLS	81
BAB V KESIMPULAN	
A. Penutup.....	85
B. Saran-Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biografi Tokoh.....	92
Daftar Terjemahan	93
Curriculum Vitae.....	95
Pedoman wawancara.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana lumpur Sidoarjo merupakan bencana yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Peristiwa ini terjadi tepatnya di dusun Balongnongo, desa Renokenongo, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. Bencana ini telah menenggelamkan sedikitnya 3 kelurahan yang didalamnya terdapat beberapa desa dan sarana umum. Banyak warga yang harus kehilangan rumah dan tanahnya, anak-anak kehilangan sekolah mereka dan banyak orang kehilangan mata pencaharian dikarenakan pabrik tempat mereka bekerja tenggelam oleh lumpur. Tidak hanya pabrik, sarana pemerintahan juga ikut tenggelam sehingga aktivitas pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik.

Masyarakat Porong yang menjadi korban karena peristiwa ini. Dalam kasus ini mereka merupakan korban lingkungan hidup. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan

perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.¹

Masyarakat Porong sangat dirugikan oleh bencana ini. Mereka mengalami kerugian dalam berbagai segi kehidupan. Mulai dari segi kesehatan, segi ekonomi, dan segi sosial. Air disekitar luapan lumpur telah tercemari oleh lumpur yang terus menerus menyembur. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terjangkit penyakit kulit. Bau menyengat yang ditimbulkan oleh luapan lumpur juga sangat mengganggu. Bau menyengat ini dapat tercium sedikitnya hingga radius 3 km. Selain dari segi kesehatan, masyarakat juga dirugikan dalam segi ekonomi. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian akibat banyak pabrik yang tergenang lumpur kemudian ditutup karena sudah tidak dapat dioperasikan lagi. Pelunasan dana ganti rugi yang harusnya mereka terima juga mengalami hambatan. PT. Lapindo Brantas mengalami masalah dalam membayar biaya ganti rugi dan akhirnya pemerintah yang memberi talangan dana untuk mengganti biaya ganti rugi kepada masyarakat. Dari segi sosial, kehidupan sosial masyarakat mulai bergeser setelah ada kejadian luapan lumpur ini karena mereka telah tercerai berai dari komunitas mereka sebelumnya. Mereka mulai membentuk komunitas baru dan berangsur-angsur meninggalkan budaya lama mereka.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menangani dan menanggulangi bencana seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 24 tahun 2007

¹ Bambang Waluyo, "*Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12.

tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.²

Tanggal 9 September 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani surat keputusan pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yaitu Keppres Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Keppres itu disebutkan, tim dibentuk untuk menyelamatkan penduduk disekitar lokasi bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan menyelesaikan masalah semburan lumpur dengan risiko lingkungan paling kecil.³

Tim dipimpin Basuki Hadi Muljono, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, dengan tim pengarah sejumlah menteri, diberi mandat selama enam bulan. Seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas tim nasional ini dibebankan pada PT. Lapindo Brantas. Namun upaya Timnas yang didukung oleh Rudi Rubiandini ternyata gagal total walaupun telah menelan biaya 900 miliar rupiah.⁴

Setelah masa kerja tim nasional selesai, tim nasional tidak dilanjutkan kembali. Kemudian pemerintah mendirikan lembaga BPLS yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan tujuan menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani

² Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab III Pasal 5.

³ Keppres No 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo.

⁴“Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo”, www.wikipedia.com, akses 17:04 06 Juni 2015.

masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo dengan memperhatikan resiko lingkungan yang terkecil.⁵

BPLS terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan Pengarah bertugas untuk memberi pengarahan, melakukan pembinaan dan sebagai pelaksana atas penanggulangan lumpur Sidoarjo. Sedangkan Badan Pelaksana yang terdiri dari Kepala Badan Pelaksana, Wakil Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi Bidang Operasi, Deputi Bidang Sosial, dan Deputi Bidang Infrastruktur bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dewan pengarah.

Peran Pemerintah dalam menanggulangi bencana lumpur Sidoarjo rupanya cukup memberikan hasil. Disamping dengan program-programnya yang telah berjalan dengan baik, kehadiran BPLS ini juga sebagai sarana yang menghubungkan antara pihak pemerintah dan korban dari lumpur Sidoarjo. Namun yang menarik, meskipun peran BPLS sangat penting tidak semua orang mengenal dan mengetahui apa itu BPLS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas , maka perlu dilakukan rumusan sebagai berikut :

Bagaimana lembaga BPLS dalam menangani bencana lumpur Sidoarjo perspektif fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*)?

⁵Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis yaitu :

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan lembaga BPLS dalam menangani bencana lumpur Sidoarjo dan mengetahui program – program BPLS dalam menangani bencana lumpur Sidoarjo.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang lembaga negara di Indonesia serta sebagai sumbangan informasi mengenai program-program yang dijalankan BPLS dalam menangani permasalahan yang muncul dimasyarakat pasca terjadi bencana lumpur Sidoarjo.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang lumpur Sidoarjo memang belum banyak diulas terlebih lagi ulasan mengenai lembaga BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari permasalahan yang dikaji serta menguatkan proses penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu. Dan berdasarkan permasalahan yang dikaji, peneliti menemukan beberapa

hasil penelitian yang juga berkaitan dengan materi yang dikaji namun tidak sama, antara lain sebagai berikut :

Pertama Jurnal yang ditulis oleh Anita Tressya Rumpopoy Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo”. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan unit analisisnya adalah individu perwakilan dari lembaga Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Jurnal ini meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan lumpur dan pihak mana saja yang dirugikan oleh bencana ini.⁶

Kedua skripsi yang ditulis oleh Maya Indah Agustina mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Yang berjudul “Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Renokenongo yang tinggal di daerah

⁶ Anita Tressya Rumpopoy, “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Sidoarjo*”, Jurnal Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2012.

Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Informan terdiri dari masyarakat Desa Renokenongo, dan juru bicara BPLS.⁷

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Furqon Hasani. Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul “Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bnecana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah ketua BPBD dan segenap staf dari segala bidang hingga relawan, kepala bidang mitigasi bencana di BPBD Batul serta masyarakat desa Tangguh.⁸

Keempatskripsi yang ditulis oleh Oktavia Ikasari. Mahasiswi Jurusan Siyasa Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta Yang Berjudul “Efektivitas Sosialisasi Tentang Dekriminalisasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dimana penulis menguraikan dan mengklarifikasi data–data penelitian dari lapangan kemudian dianalisa dan dipaparkan secara

⁷Maya Indah Agustina, “*Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2009.

⁸ Furqon Hasani, “*Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam*” , Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2015.

sistematis. Selain itu menggunakan metode berfikir deduktif, dimulai dari pernyataan dan pola berfikir yang diperoleh dari data umumnya yang ditelaah, diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulannya.⁹

Dari penelusuran pustaka diatas hanya mengulas tentang dampak sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam menangani korban lumpur Sidoarjo. Selain itu tulisan yang lain menjelaskan tentang lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang difungsikan untuk menangani permasalahan masyarakat dalam hal bencana maupun korban penyalahgunaan narkoba namun belum ada tulisan yang membahas tentang kinerja BPLS secara khusus dalam menangani dampak sosial masyarakat atau dalam hal ini korban lumpur Sidoarjo. Oleh sebab itu tulisan ini nantinya akan membahas kinerja BPLS secara terperinci dalam menangani masalah lumpur Sidoarjo dan khususnya dalam menangani masalah sosial masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Islam merupakan agama yang *Râhmatan lil' alamin* yang artinya agama yang memberi kebaikan bagi semua umat manusia. Dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang pada dasarnya untuk kemaslahatan umatnya. Ajaran-ajaran dalam Islam terdapat fungsi yang mana adalah untuk kebaikan. Ajaran-ajaran tersebut sebagai petunjuk maupun pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan agar mendapat keselamatan.

⁹ Oktavia Ikasari, “Efektivitas Sosialisasi Tentang Dekriminalisasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Definisi *ushul fiqh* sebagai pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) hukum-hukum *fiqh*. Atau dengan kata lain *ushul fiqh* adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalan) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil *syar'i*.¹⁰ Ushul fiqh juga membahas bagaimana cara mengistinbathkan hukum dari dalil-dalil.¹¹

Sedangkan definisi *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.¹² Dalam ajarannya *fiqh* terbagi menjadi beberapa aspek. Salah satunya adalah *fiqh siyasah* dimana *fiqh siyasah* lebih cenderung membahas tentang hukum dan pemerintahan. *fiqh siyasah* mengajarkan tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin memimpin umatnya (negara). Diajarkan pula jika dalam mengambil keputusan mereka harus mengambil keputusan dengan mementingkan kemaslahatan umat, bukan golongan apalagi diri sendiri. Dalam pengambilan setiap keputusan harus menghindari keputusan yang bisa berdampak buruk bagi umat.

Hal ini juga sama seperti yang diajarkan dalam ushul fiqh. Dalam ushul fiqh terdapat *masalah mursalah* yang memiliki konsep *maqasid syariah* dimana dalam pengambilan keputusan harus mementingkan lima hal

¹⁰ Hasbyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Metode Istinbat Dan Istidlal*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2013, hlmn 2.

¹¹ Yusuf, Muhammad, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Pokja Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2005, hlm 8.

¹² Zada, Khamami, Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlmn 2.

yakni agama (*al-dn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mâl*) dan aqal (*al-aql*). Hal ini juga sama seperti tujuan dari fiqh siyasah (siyasah syar'iyah).¹³

Tujuan penting dari *siyasah syar'iyah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. *Siyasah syar'iyah* mengajarkan tentang bagaimana seorang pemimpin harus dapat memimpin dan mengambil keputusan dengan cara bijak dan adil. Segala keputusannya harus berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat sehingga apapun itu nantinya harus memperkecil dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh keputusan yang diambil.

F. Metode Penelitian

Skripsi ini mengulas tentang kinerja BPLS dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan jawaban dan tinjauan langsung mengenai program-program dan dampak sosial masyarakat yang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/*field research*.

Peneliti mencari data dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan individu ataupun kelompok maupun hasil obsevasi terhadap benda, kegiatan

¹³ Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-mustasfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H), hlm 438.

maupun kejadian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak – pihak perwakilan BPLS. Pihak-pihak tersebut merupakan Kapokja Perlindungan dan Pemulihan Sosial, dan Kapokja Perencanaan Sosial. Sedangkan dari pihak masyarakat merupakan perwakilan dari orang yang menjadi korban luapan lumpur. Mereka adalah warga Tanggulangin

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini merupakan data yang didapat dari buku, jurnal, *website*, perundang – undangan dan lain – lain guna menambah, memperkuat dan memperjelas analisis terhadap tugas-tugas dari lembaga BPLS.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data awal dengan cara pencatatan sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam hal ini yang observasi dilakukan di kantor BPLS dan wilayah Porong, dengan mengamati kinerja BPLS dan kondisi korban lumpur serta hasil dari kinerja BPLS.

b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian dilakukan wawancara. Wawancara

dilakukan terhadap narasumber dari perwakilan pihak BPLS yaitu Kapokja Perlindungan dan Pemulihan Sosial, Kapokja Perencanaan Sosial dan perwakilan dari korban lumpur yang tinggal di rumah tinggal yang dibuat oleh pemerintah.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif analisis data dilakukan setelah semua data, baik data primer maupun data sekunder terkumpul. Setelah semua data terkumpul, kemudian di telaah, diolah dan dianalisis. Data yang didapat dari wawancara dan observasi kemudian dianalisa dengan pendekatan fikih siyasah (*siyasah syar'iyah*). Prinsip-prinsip dasar siyasah yang berhubungan dengan pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, akan dibagi menjadi beberapa bab yang dibagi pula dalam beberapa sub bab guna memudahkan dan agar lebih terarah. Bab I berisi tentang pendahuluan. Pada pendahuluan akan menjelaskan tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

BAB II memberikan penjelasan tentang keterkaitan antara isi skripsi dan teori yang dipakai yaitu teori *fiqh siyasah* yang banyak dijelaskan oleh beberapa ulama salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf. BAB III berisi tentang hasil yang didapat oleh penulis selama penelitian seperti dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dan penggalian data dari website resmi.

BAB IV berisi tentang analisis yang membahas bagaimana tugas atau program-program BPLS jika dikaitkan dengan prinsip keislaman dalam Perspektif *fiqhSiyasah*. Bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan BPLS, apakah sudah sesuai atau belum dengan nilai-nilai keislaman khususnya *fiqhSiyasah*.BAB V akan berisi tentang kesimpulan yang mencakup semua isi dari skripsi serta kritik dan saran.



BAB V

KESIMPULAN

A. Penutup

Semburan lumpur yang telah terjadi di wilayah Porong yang juga menenggelamkan sedikitnya 3 kelurahan, memang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materi saja. Mulai dari tenggelamnya rumah, hilangnya mata pencaharian, dan lingkungan yang harus tercerai berai. Terdapat dua hipotesis mengenai penyebab semburan. Penyebab pertama di indikasi ada faktor kelalaian manusia didalamnya. Dalam pengeboran yang terjadi di sumur Banjarpanji 1 ada beberapa hal yang tidak dilakukan sehingga hal tersebut memicu adanya semburan. Sedangkan hipotesis kedua adalah dipicu oleh bencana lain atau dalam hal ini gempa di Yogyakarta yang memicu terjadinya semburan. Hal ini menimbulkan kerancuan atas penamaan bencana semburan lumpur. Ada yang menyebut 'bencana lumpur Lapindo' dan ada juga yang menyebut 'bencana lumpur Sidoarjo' seperti penamaan yang diberikan oleh pemerintah.

Pemerintah kemudian mengambil satu tindakan untuk menangani permasalahan pelik tersebut. Pemerintah, berdasarkan Keppres No 13 Tahun 2006, kemudian membentuk TimNas PSLs (Tim nasional penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo) yang bertugas untuk menyelidiki dan menghentikan semburan lumpur yang terus menerus terjadi. Masa tugas tim

ini hanya selama 6 bulan yang kemudian diperpanjang 1 bulan. Tim ini bertugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka untuk mengendalikan aliran lumpur di Sidoarjo termasuk penghentian dari semburan lumpur, pengelolaan semburan lumpur, dan mengelola permasalahan sosial. setelah tugas TimNas PSLs resmi diberhentikan, pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga khusus yang bertugas untuk menangani tidak hanya semburan lumpur saja namun juga dampak yang diakibatkan oleh semburan lumpur tersebut. Lembaga ini adalah BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). BPLS merupakan suatu lembaga yang bersifat Ad Hoc yang di bentuk oleh pemerintah. BPLS dibentuk setelah masa kerja TimNas PSLs berakhir. Berdasarkan Keppres No. 14 Tahun 2007 BPLS memiliki tugas di 3 bidang yaitu bidang operasional, bidang infrastruktur, dan bidang sosial.

Siyasah Syar'iyah mengajarkan tentang beberapa hal diantaranya tentang pengambilan keputusan melalui musyawarah, menjamin kesejahteraan masyarakat dan tentang pelaksanaan amanat. Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah sejauh ini sudah sesuai dengan ajaran-ajaran *siyasah syar'iyah*. Karena apa yang mereka kerjakan telah memenuhi 3 kriteria diatas.

Dalam hal musyawarah, pemerintah telah bermusyawarah untuk membentuk lembaga ad hoc yaitu BPLS. Sedangkan dalam hal menjamin kesejahteraan masyarakat, BPLS memiliki beberapa program yang menjamin kesejahteraan para korban baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun

pemenuhan hidup. Dalam hal amanat, BPLS juga telah melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah dalam hal pemberian ganti rugi kepada para korban. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun BPLS telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam *siyasah syar'iyah*. Sedangkan dalam hal menjamin kesejahteraan dalam hal pendidikan, ekonomi dan kesehatan, BPLS telah menjalankannya melalui beberapa programnya yang sangat berkaitan dengan beberapa hal diatas. Seperti pelatihan-pelatihan, pemberian air bersih dan pengobatan serta pemulihan infrastruktur yang dilakukan oleh BPLS.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang dapat dipergunakan untuk kemajuan lembaga BPLS sendiri.

1. Koordinasi antara BPLS dan pemerintah sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana BPLS memiliki agenda rutin untuk mengadakan rapat baik dengan badan pelaksana maupun dengan Badan pengawas. Namun akan lebih baik jika hal ini dibarengi dengan adanya koordinasi yang baik pula dengan warga. Ini dapat diwujudkan dengan mengadakan rapat rutin, atau adanya perwakilan warga yang akan selalu berhubungan dengan BPLS. Perwakilan warga ini bertugas untuk memantau adanya kesulitan-kesulitan yang dialami warga.

2. Pemerintah sudah benar dengan memberikan dana talangan untuk PT. Lapindo Brantas untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran yang belum diterima warga. Namun ada baiknya hal tersebut dibarengi dengan penyuluhan agar warga masyarakat dapat menggunakan dana tersebut dengan bijak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT Karya Thoha Putra, 1998

Buku, Jurnal, Skripsi

Agustina, Maya Indah, *Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2009.

Ahmad, Sukarja H, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara : dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Akbar, Ali Azhar, *Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo*, Yogyakarta: PT Galang Press, 2007.

Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih, *Politik Islam Menjelaskan Kitab Siyasah Syar'iyah Ibn Taimiyah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2004.

Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Prakti*, Jakarta: Kencana, 2006

Farida, Anis, *Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2013.

Fissilmi, Firas, *"Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menjelang Pemilu 2014 Perpektif Siyasah Syar'iyah"*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Furqon, Hasami, *"Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam"*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Yogyakarta, 2015.

Huda, Miftakhul, *"Pelaksanaan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 Perspektif Fiqh Siyasah"*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

- Ibnu dkk, Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ikasari, Oktavia, “*Efektivitas Sosialisasi Tentang Dekriminalisasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Jazuli A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta 2003
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam, terj. Zainuddin Adnan. Cet. ke 2*,
- Khusrini, Umi, *Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014 - 2019*
- Musa, Muh. Yusuf, *Politik dan Negara Dalam Islam, Terj. M. Thalib*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 1990
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rumpopoy, Anita Tressya, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Sidoarjo*, Jurnal Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2012.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar’iyyah Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Toyib, Muhammad, “*Implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam Tinjauan Siyasah Syar’iyyah*”, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zada, Khamami, Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Keppres No 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo.

Peraturan Presiden No 37 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Peraturan Presiden No 68 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Peraturan Presiden No 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

Website

“BPLS”, www.BPLS.go.id/2011-07-07-21-11-25, akses 26 Juni 2015.

“Lapindo”, Lapindo-brantas.co.id/id, akses 11:55 11 Maret 2016.

“Laporan terhadap Dampak Sosial di Masa Lalu, Masa Saat Ini dan Masa Depan dari Lumpur Sidoarjo”, www.hsf.humanitus.org/media/hsf_sosial_inpacr_report_ind.pdf, akses 06 November 2015.

“Opini”, www.bpls.go.id/opini, akses 06 Juni 2015.

“Terjemahan Al-Qur’an”, <https://www.jembersantri.id/2015/02/download-alquran-in-word-v22-terbaru.html>, akses 08 Mei 2016.

Wikipedia, www.wikipedia.com, akses 17:04 06 Juni 2015.

BIOGRAFI

ABDUL WAHAB KHALLAF

Syaikh Abdul Wahab Khallaf lahir pada bulan Maret tahun 1888 M di Kafr al-Zayyat, Mesir. Beliau telah menghafal Al-Qur'an sejak kecil. Setelah menamatkan Al-Qur'an beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (Madrasah al-Qadha'al-Syar'i). Beliau kemudian menamatkan pendidikan disana pada tahun 1919 dan diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut.

Ketika terjadi revolusi di Mesir pada tahun 1919, Syaikh Abdul wahab Khallaf merupakan salah satu ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Dan kemudian beliau berpindah instansi dari pengajar di Sekolah Tinggi menjadi Hakim di Mahkamah *Syar'iyah* Mesir. Beliau kemudan diangkat menjadi hakim pada tahun 1920 , lalu diangkat pula menjadi direktur urusan masjid yang berada dibawah kementrian wakaf pada tahun 1924 hingga kemudian beliau ditunjuk menjadi Inspektur Pengawas Pengadilan tahun 1931.

Pada tahun 1934, beliau menjadi guru besar di Chairo University. Beliau mengabdikan disana hingga tahun 1948. Ketika sudah pensiun, beliau tetap menjadi pengajar disana walaupun dalam keadaan sakit. Syaikh Abdul Wahab Khallaf wafat pada tanggal 19 januari 1956 dan dimakamkan di Ghufair. Beberapa karyanya telah menjadi pedoman untuk mahasiswa fakultas syariah. Beberapa karyanya antara lain :

1. *'Ilm Ushul al-Fiqh;*
2. *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah;*
3. *Khulashah al-Tasryi' al-Islami;*
4. *Al-Siyasah al-Syar'iyah;*
5. *Al-Suluthat al-tsalat fi al-Islam;*
6. *Nur Min al-Islam.*

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HLM	F.N	Terjemahan
1		88	<p>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.</p>
2		91	<p>. “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanNya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahi sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”</p>
3		93	<p>Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha</p>

			Bijaksana.
--	--	--	------------



CURRICULUM VITAE

Nama : Dhita Resty Handayani
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo / 05 September 1989
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Geneng RT 01 RW 01 Karangrejo Kendal.
 Kab Ngawi Jawa Timur
 No telepon : 082210384750
 Email : Astratea89@yahoo.com

Pendidikan Formal :

Sekolah	Mulai	Sampai
SD Bhayangkari 7	1997	2001
SMP Bhayangkari 10	2001	2004
SMA Bhayangkari 3	2004	2007
UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Siyasah	2011	2016